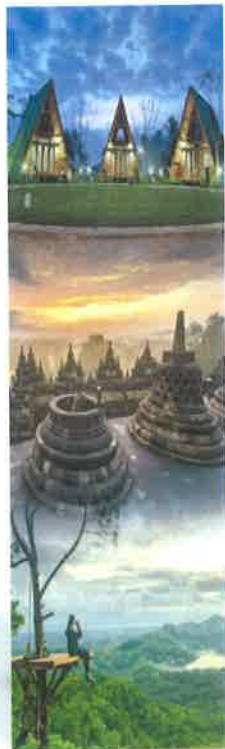




SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

## ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut Asdep Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menetapkan Sasaran Strategisnya yaitu *"Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim"*. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendukung tugas Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Asdep Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai kewajiban mendukung tugas Sekretaris Kabinet tersebut melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

Jakarta, Januari 2020

Asisten Deputi Bidang  
Kepariwisata, Riset dan Teknologi,  
dan Lingkungan Maritim,

  
M. Arief Khumaidi

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 dibuat dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggaraan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. LKj ini memotret capaian kinerja Asdep Kepariwisata yang diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam mengukur capaian kinerja menggunakan indikator kegiatan, yaitu “yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman”, yang meliputi rekomendasi kebijakan; rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU; serta rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman tercapai sejumlah 130 rekomendasi. Dari 130 rekomendasi, seluruhnya disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan/atau disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Hal itu berarti rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target.

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim mendapatkan pagu anggaran tahun 2019 sejumlah Rp.1.050.000.000,00 dengan realisasi anggaran berjumlah Rp 1.034.563.545 atau teralisasi sebesar 98,52%, sehingga kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat dinilai efektif dan efisien berdasarkan penggunaan anggaran dalam menghasilkan output/outcome untuk mencapai tujuan.

# DAFTAR ISI

Sampul	
Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Kepariwisata dan Lingkungan Maritim 2019 .....	4
C. Gambaran Aspek Strategis .....	10
D. Permasalahan Strategis .....	12
E. Sistematika Penyajian .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Gambaran Umum Rencana Kinerja Tahun 2019 .....	15
B. Ringkasan Penetapan Kinerja Asdep Bidang Kepariwisata dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 .....	18
C. Ikhtisar IKU Asdep Bidang Kepariwisata dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 .....	20
D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja .....	21
E. Peningkatan Sumber Daya Manusia .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>25</b>
A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Kepariwisata dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 .....	25
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Deputi Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	19
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama .....	20
Tabel 2.4	Dinas Luar Negeri Tahun 2019 .....	24
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis .....	26
Tabel 3.2	Realisasi Output Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	28
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Indikator I Tahun 2019 .....	29
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Indikator II Tahun 2019 .....	41
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Indikator III Tahun 2019 .....	45
Tabel 3.6	Kegiatan Pendukung Pencapaian Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 .....	48

# DAFTAR DIAGRAM DAN GRAFIK

Diagram 1.1.	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	7
Diagram 1.2.	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	8
Diagram 1.3.	Proporsi Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1) .....	8
Diagram 1.4.	Permasalahan Strategis Berdasarkan Peta SWOT .....	13
Grafik 3.1.	Realisasi Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015-2019 .....	28
Grafik 3.2.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019 .....	51

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim ..... 9
- Gambar 3.1. Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk Indikator Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Dan Penyelenggaraan Pemerintahan ..... 30
- Gambar 3.2. Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur ..... 32
- Gambar 3.3. Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas 15 Juli 2019 Terkait Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo .. 33
- Gambar 3.4. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim memimpin Rapat Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika dan Labuan Bajo ..... 34
- Gambar 3.5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kawasan Pariwisata Danau Toba ..... 36
- Gambar 3.6. Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Tanggal 5 Juli 2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pariwisata di Sulawesi Utara ..... 37
- Gambar 3.7. Wakil Sekretaris Kabinet bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur Sumatera Barat menghadiri Acara Puncak Sail Nias 2019 ..... 39
- Gambar 3.8. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memberikan Keterangan Pers pada Acara Puncak Hari Nusantara 2019.. 40

Gambar 3.9. Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk Indikator Persentase Rancangan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU .....	41
Gambar 3.10. Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Pembahasan Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas RPerpres Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru tanggal 2 April 2019 ...	42
Gambar 3.11. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim memimpin Rapat Pembahasan Tanggapan Kementerian PAN-RB atas RPerpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan RPerpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi ...	43
Gambar 3.12. Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk Indikator Persentase Rancangan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.....	46
Gambar 3.13 Presiden menerima anugerah penghargaan sebagai Bapak Pariwisata Nasional, yang diserahkan pada Gala Dinner Peringatan HUT ke-50, di Hotel Grand Sahid Jaya .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pentingnya LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LKj merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet melaksanakan kinerjanya sesuai dengan standar organisasi secara akuntabel, dinilai oleh *stakeholder*. Diharapkan LKj Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Sekretariat Kabinet dapat memenuhi harapan dalam menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pelaporan, dan mengungkapkan pencapaian kinerjanya secara efektif dan efisien melalui pengukuran yang baik.

## **A. Latar Belakang**

Dalam sistem presidensial, peranan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting. Dalam menjalankan mandatnya Presiden memerlukan dukungan, baik yang bersifat teknis, administratif dan pemikiran. Dukungan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet agar kinerja kabinet terselenggara dengan baik. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet, menyebutkan bahwa Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agar pelaksanaan tugas Sekretaris Kabinet dapat berjalan dengan baik, maka dukungan pengelolaan manajemen cabinet di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim kepada Presiden disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Kemaritiman.

Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melaksanakan program dan berbagai kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan kepada Deputy Bidang Kemaritiman di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. Dalam melaksanakan tugas utamanya melalui kegiatan-kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyediaan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap

perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim akan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Laporan kinerja berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2019. LKj ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim selama Tahun 2019 yaitu melalui perbandingan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan indentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

## **B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019**

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pasal 263 menyebutkan bahwa Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

### **1. Fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, ditetapkan bahwa Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;

- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman.

## **2. Struktur Organisasi**

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, didukung oleh 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu: Kepala Bidang Pariwisata; Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim; Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **a. Kepala Bidang Pariwisata**

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata.

Kepala Bidang Pariwisata terdiri dari:

(1) Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata; dan

(2) Subbidang Sumber Daya Manusia, Data, dan Informasi Pariwisata.

**b. Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim**

Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset, teknologi, observasi dan informasi maritim.

Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim terdiri dari:

(1) Subbidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim; dan

(2) Subbidang Data dan Informasi Maritim.

**c. Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam**

Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap

perkembangan umum di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

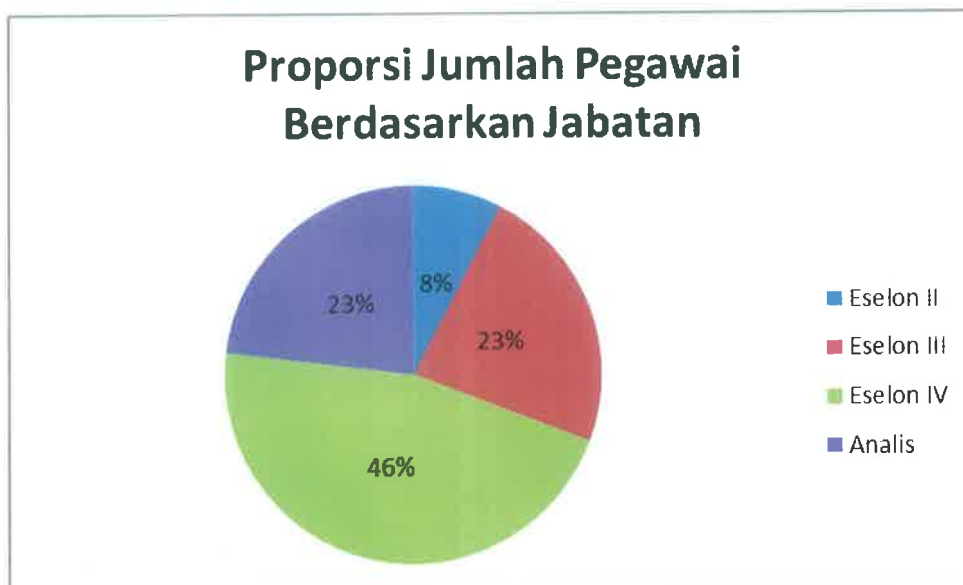
Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal terdiri dari:

- (1) Subbidang Lingkungan Maritim;
- (2) Subbidang Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Jumlah pegawai Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah 13 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 10 Orang dan staf analis sebanyak 3 orang. Selain itu Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 1 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2019 adalah eselon II berjumlah 1 orang, eselon III berjumlah 3 orang, eselon IV berjumlah 6 orang dan analis berjumlah 3 orang. Presentase proporsi jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Diagram 1.1**  
**Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**



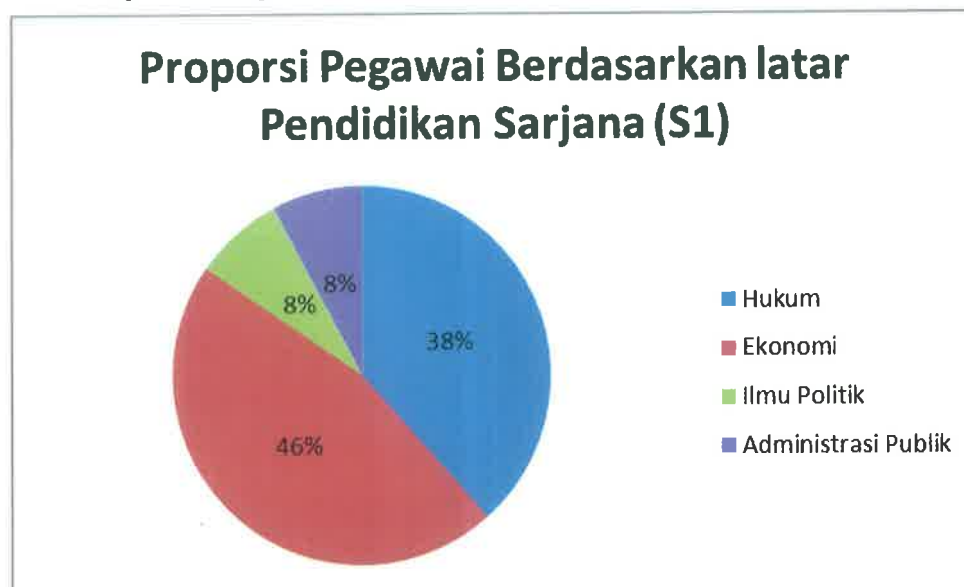
Berdasarkan latar tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia di Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terdiri dari S1 berjumlah 7 orang, dan S2 berjumlah 6 orang, sebagai berikut:

**Diagram 1.2**  
**Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dilihat dari latar pendidikan S1 dari disiplin ilmu terdiri dari Sarjana Hukum 5 orang, Sarjana Ekonomi 6 orang, Sarjana Ilmu Politik 1 orang, dan Sarjana Administrasi Publik 1 orang.

**Diagram 1.3**  
**Proporsi Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1)**



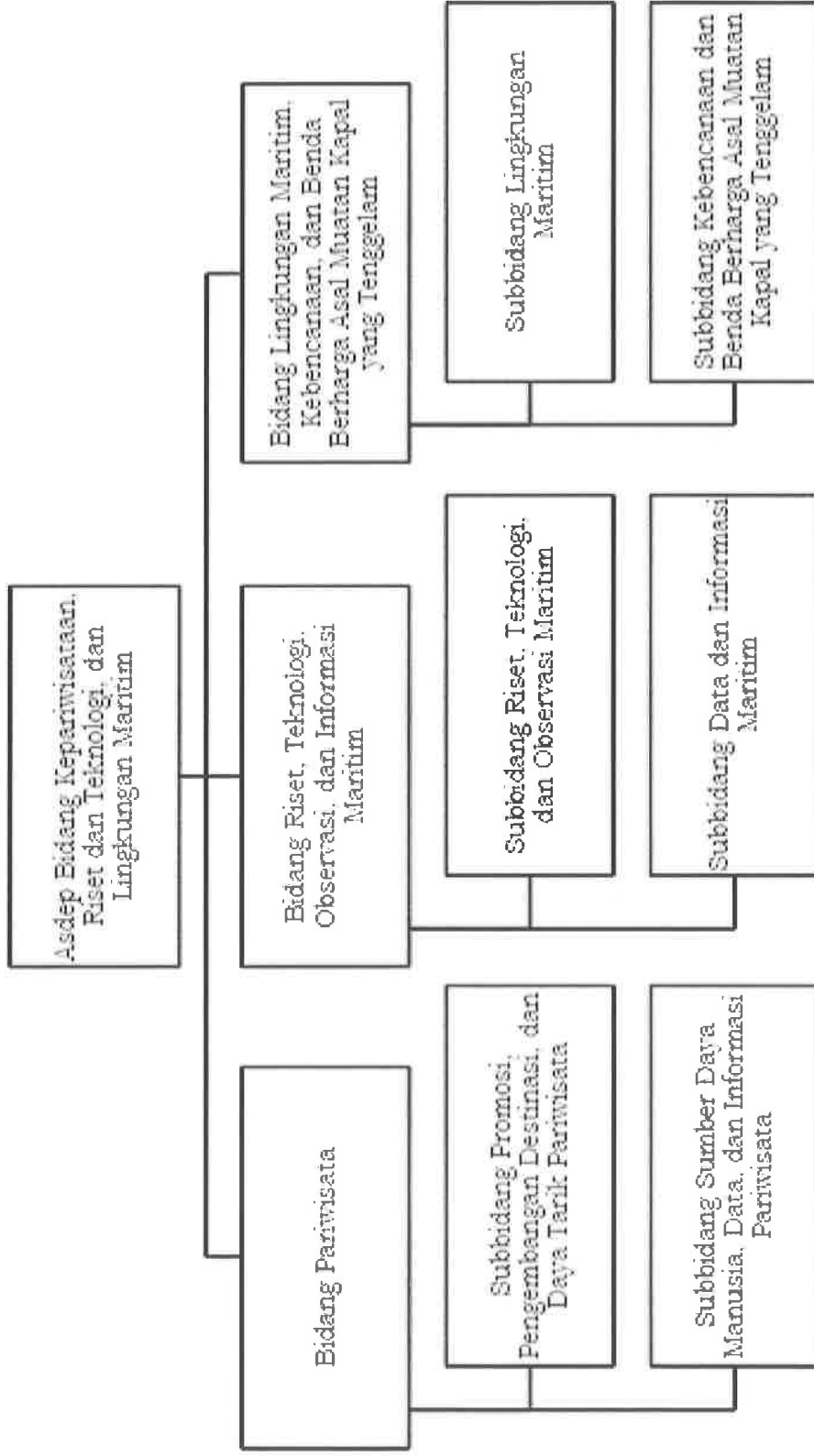
Adapun struktur Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI

ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM



### **C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan, yaitu *memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan*. Memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat Kabinet menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berperan dalam pencapaian sasaran strategis tersebut melalui output kinerja rekomendasi kebijakan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Peran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet adalah keberhasilannya dalam pencapaian Sasaran Strategis melalui berbagai kegiatan unit kerja dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Sasaran Strategis dimaksudkan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang akan dicapai tersebut adalah sebagai berikut:

***Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim***

Pelaksanaan sasaran strategis di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim tersebut tercermin dari keluaran (*output*), yaitu kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, melalui kegiatan "Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim" (Kode Kegiatan 5830).

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 mempunyai 3 (tiga) kelompok *output*, yaitu:

- a. Rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (rekomendasi kebijakan).
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (rekomendasi Persetujuan PUU).
- c. Rekomendasi materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (rekomendasi materi sidang).

Tiga *output* kinerja tersebut merupakan ekstrak yang berasal dari fungsi-fungsi, yaitu:

- a. *Output* rancangan rekomendasi kebijakan berasal dari fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.
- b. *Output* rancangan rekomendasi persetujuan PUU berasal dari fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan

peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

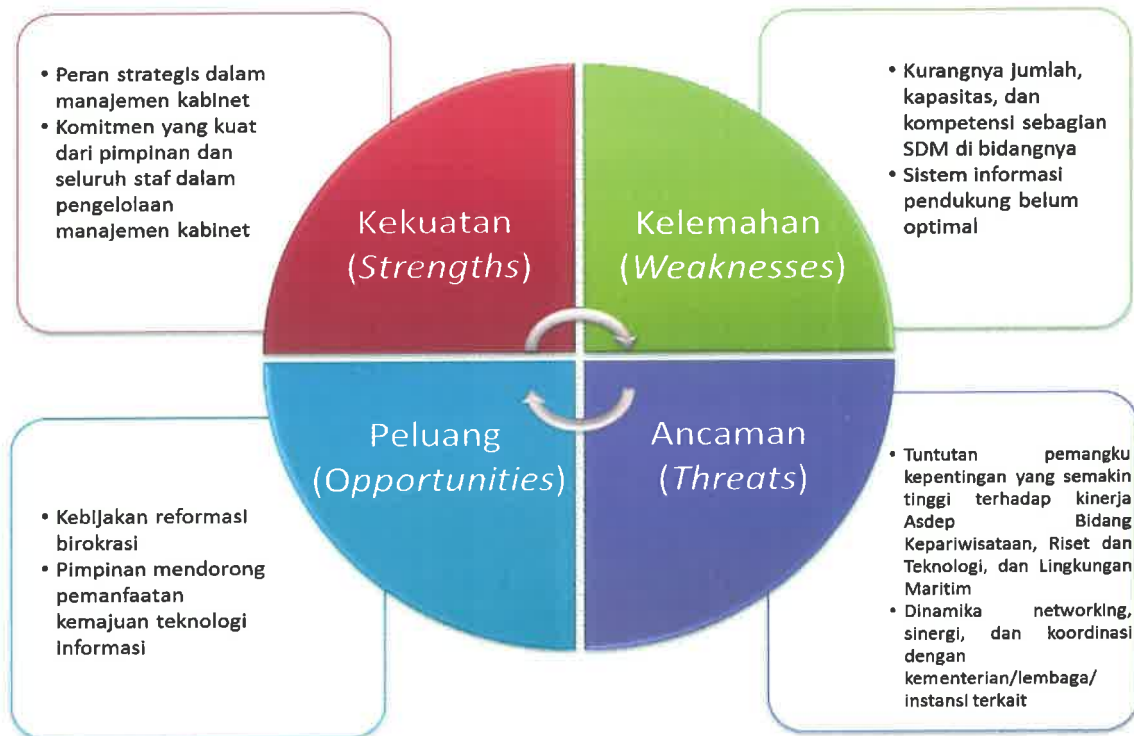
- c. *Output* rancangan rekomendasi materi Sidang Kabinet berasal dari fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menggunakan SP/SOP yang telah ada dan SOP yang berasal dari penyempurnaan/penyesuaian tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang baru, yaitu rekomendasi sidang kabinet. Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SP/SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan, sehingga dapat menggambarkan SP/SOP/panduan yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### **D. Permasalahan Strategis**

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam mengoptimalkan perannya dalam mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet masih menghadapi berbagai permasalahan. Analisis terhadap isu-isu strategis di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan strategis yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat dianalisis berdasarkan peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau SWOT sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Diagram 1.4**  
**Permasalahan Strategis Berdasarkan Peta SWOT**



Dari hasil analisis SWOT tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja serta menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan baik, antara lain melalui upaya:

1. Memperluas dan memperkuat *networking* yang efektif dengan para *stakeholder* yakni K/L, pemerintah pusat dan daerah, BUMN, swasta, para pelaku usaha atau pun pihak lain yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah, terutama di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
2. Melakukan koordinasi, sinergi guna *debottlenecking* dengan para *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui pemantauan, pengamatan langsung, rapat koordinasi, *focus group discussion* dan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;

3. Pengembangan aplikasi SITAP secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan aplikasi ini merupakan *database* yang mencakup seluruh arahan dan janji Presiden serta digunakan sebagai media *monitoring* tindak lanjut Arahan Presiden dan Janji Presiden di seluruh kementerian dan lembaga;
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM guna menghasilkan analisis dan usulan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan diklat/*workshop*/seminar/FGD antara lain analisis kebijakan (RIA, CBA, dll), *legal drafting*, geospasial, serta analisis dan visualisasi data;
5. Penambahan SDM dengan kualifikasi tertentu atau realokasi SDM sesuai dengan analisis beban kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
6. Melakukan *monitoring* capaian kinerja melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) dari level eselon I hingga IV setiap tiga bulan sekali. Pelaksanaan *monitoring* ini sebagai salah satu bentuk perwujudan reformasi birokrasi yang ada di Kedeputian Bidang Kemaritiman.

## E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas profil Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Tahun 2019 ini.

**Bab II Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019**, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan Tahun 2019.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019.

**Bab IV Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2019 ini dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

# **RENCANA KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2019**

### **A. Gambaran Umum Rencana Kinerja Tahun 2019**

Dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet, terutama di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan metode pengukurannya. Tujuan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 adalah hasil dari pelaksanaan fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (termasuk dalam menjalankan pengelolaan manajemen kabinet dan arahan Presiden berjalan secara cepat dan tepat, Asisten Deputi Bidang kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat mengawal penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden apabila di perintahkan oleh Sekretaris Kabinet). Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau

pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung kinerja Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menetapkan sasaran yaitu:

***Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim***

Sasaran terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat tercapai dengan peningkatan kualitas hasil rekomendasi yang di hasilkan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman. Semakin berkualitas rekomendasi tersebut terlihat apabila rekomendasi kebijakan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman tersebut merupakan indikator bahwa rekomendasi telah disetujui.

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	<p><b>Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan</b></p> <p>Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</p>	<p>Persentase rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>



Peningkatan rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui kegiatan perumusan dan analisis rencana kebijakan pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Pemberian rekomendasi secara tepat dari sisi substansinya, karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap tepat apabila ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi kebijakan dimaksud merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet yang diwujudkan dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang kemudian dimanfaatkan oleh Presiden dalam memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Rekomendasi tersebut diperlukan antara lain untuk memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah, mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian/ lembaga; dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Perpres No. 25 tahun 2015 telah memfungsikan Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyeleggaran tugas dan fungsi pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet berpotensi meningkatkan beban kerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Dalam mendukung sasaran strategis yang merupakan hasil atau *outcome* yang akan dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Capaian *outcome* tersebut didukung oleh kegiatan ketiga bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, yaitu:

1. Bidang Pariwisata;
2. Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
3. Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan perumusan dan analisis, penyiapan pendapat atau pandangan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan puu di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hasil rekomendasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi, penyelesaian permasalahan di lapangan, dan analisis bahan-bahan terkait dengan substansi masalah kebijakan yang akan disusun.

## **B. Ringkasan Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Penetapan Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Penetapan kinerja berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur

transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/ membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi.

Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA**

Satuan Organisasi : Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim  
Tahun : 2019

(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%

Dalam menjalankan Perjanjian Kinerja tersebut Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim didukung pagu anggaran sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah).

Target indikator persentase rancangan rekomendasi yang berkualitas sebesar 100%, digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, semakin

banyak rekomendasi yang diterima oleh Deputi Bidang Kemaritiman berarti kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim semakin tinggi.

### C. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim di samping telah menetapkan Sasaran Strategis, juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019. Sasaran Strategis dan IKU sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</li> <li>2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</li> <li>3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</li> </ol>	Menunjukkan pencapaian kinerja yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim kepada Deputi Bidang Kemaritiman

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja, digunakan ukuran yaitu "disetujui". Indikator persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang

disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman, maka semakin tinggi pula capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis dan saran kebijakan dan hasil disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Sekretaris Kabinet.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja *outcome*, yaitu persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman, dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya, maka semakin tinggi pencapaian kinerja.

## **D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja**

### **1. Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet dan guna memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menyusun Renstra.

Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melalui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dengan Surat Keputusan Nomor: SK.01/MARITIM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

Tim bertugas menyusun Renstra Deputy dan Asisten Deputy di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman. Renstra Kedeputan Bidang Kemaritiman ditetapkan pada tanggal 29 September 2015 dengan visi: “Menjadi Deputy Bidang Kemaritiman yang profesional dan andal dalam mendukung Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman.” Sedangkan visi Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah “Menjadi Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang profesional dan andal dalam mendukung Deputy Bidang Kemaritiman menyelenggarakan pemerintahan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut: “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Deputy Bidang Kemaritiman dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang baik (*good governance*)”.

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan unit kerja yang berada di bawah Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan penyiapan analisis dan pengolahan materi Sidang Kabinet, Rapat, atau pertemuan, salah satunya di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merupakan tugas Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, Deputy Bidang Kemaritiman mengeluarkan edaran melalui memorandum nomor M-374/Maritim/9/2018 tanggal 24 September 2018. Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan edaran tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas dimaksud.

## **3. Pengembangan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam era modern saat ini dalam berbagai sektor terkait pemerintah maupun swasta.

Dalam sektor pemerintah, dengan adanya teknologi informasi, maka komunikasi dan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dalam rangka mendukung kinerja suatu organisasi. Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah adanya mekanisme pengumpulan data. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai *Standar Operasional Prosedure (SOP)* tentang pengumpulan data berdasarkan pada Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman tentang *Standar Operasional Prosedure (SOP)* tentang pengumpulan data kinerja. Mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pengagendaan surat masuk dan surat keluar berbasis web (*E-agenda*). *E-agenda* ini dikembangkan untuk mendukung kualitas penyediaan data dan informasi agar lebih optimal, antara lain:

- a. Arsip sudah didokumentasikan dalam bentuk *soft copy (paperless)* dan sudah diklasifikasikan menurut bidang dan tugas fungsinya, sehingga akan mempermudah dalam proses pencarian karena sudah terintegrasi dengan sistem;
- b. Pencarian data dan berkas pendukung dapat dilakukan dengan sistematis dan saling terintegrasi. Artinya ketika pegawai membutuhkan memo laporan yang pernah disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian tidak perlu mencari secara manual dari hardcopy, tetapi dicari di *E-agenda* tersebut dan setelah data ditemukan, pegawai cukup mendownload memo laporan tersebut yang sebelumnya sudah dikonversi menjadi bentuk softcopy;
- c. Informasi jadwal agenda rapat pimpinan dapat diberikan secara cepat;
- d. Terkait penyajian data untuk penyusunan Laporan Kinerja, rekapitulasi data dapat diperoleh kapan saja karena dihitung secara otomatis.

Dengan dikembangkannya sistem *E-agenda* ini, waktu penyelesaian berkas masuk yang ditangani Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat dilihat secara otomatis tanpa menghitung secara manual. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau (*monitoring*) pencapaian kinerja khususnya indikator ketepatan

waktu. *Monitoring* ini dapat dilihat secara berkala baik triwulanan, setiap bulan bahkan setiap minggu.

Untuk mendukung penghematan pemerintah, dokumen atau arsip berupa surat keluar dan surat masuk telah dilaksanakan elektronik, yaitu berupa *soft copy* dari hasil scan disposisi deputi, hasil analisis, surat keluar maupun surat masuk. Diharapkan melalui penyimpanan dokumen secara elektronik akan memudahkan pelacakan data dan penghematan kertas.

## E. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan *capacity building* di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti beberapa Diklat, Bimtek, maupun Workshop, yaitu:

1. *Culture Alignment Workshop*, diikuti oleh Analis Hukum pada Subbidang Lingkungan Maritim;
2. Diklat Infografis, diikuti oleh Analis Perekonomian pada Sub Bidang SDM, Data, dan Informasi Pariwisata, dan Analis Hukum pada Sub Bidang Lingkungan Maritim;
3. Pelatihan Tata Cara Sistem Pengelolaan Penggunaan Anggaran Negara, diikuti oleh Analis Perekonomian pada Sub Bidang SDM, Data, dan Informasi Pariwisata;
4. Pelatihan *3 Habits for Effective Employee*, diikuti oleh Analis Perekonomian pada Sub Bidang SDM, Data, dan Informasi Pariwisata.

Selanjutnya pejabat dan pegawai Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga melakukan tugas dinas ke luar negeri dengan tujuan 1 (satu) negara yang melibatkan 1 (satu) orang pejabat dan pegawai dengan data sebagaimana terlampir.

**Tabel 2.4**  
**Dinas Luar Negeri Tahun 2019**

No.	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Peserta
1.	26-28 Juni 2019	<i>4th International Conference on Public Policy (ICPP) 2019</i>	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2019**

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

#### **A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.”** Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan indikator kegiatan yaitu **“yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman”**, meliputi *rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan puu di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.*

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau

Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Kemaritiman, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut:

1. *Top Down*

Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi Bidang Kemaritiman sampai dengan diteruskannya saran kebijakan kepada *stakeholder*.

2. *Bottom Up*

Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diteruskannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholder*.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis “yang disetujui” dihitung menggunakan rumus 1, dengan hasil capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Sasaran Strategis**

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<b><i>Persentase rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i></b>	100%	100%	100%

Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah sebagai berikut:

**1. Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman**

Maksud rancangan rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui adalah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Disetujui mengandung pengertian bahwa substansi dari analisis tersebut adalah tepat, sehingga digunakan Deputi Bidang Kemaritiman untuk disampaikan

kepada Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan atau kepada K/L terkait. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *stakeholder*, dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil Presiden khususnya, dan pemerintah pada umumnya. Indikator dalam Sasaran Strategis berbunyi "*Persentase rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman*", dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Dari 452 berkas masuk (*input*), rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim kepada Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah 130 berkas (*output*). Jumlah *input* yang lebih banyak dibandingkan *output* dikarenakan jenis *input* berupa undangan rapat ataupun kegiatan lainnya yang ditujukan kepada Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, sehingga rekomendasi yang diproses cukup disampaikan kepada Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Selain itu, terdapat satu rekomendasi yang dihasilkan dari beberapa berkas masuk, sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa berkas masuk dihasilkan satu rekomendasi yang komprehensif.

Berkas-berkas yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim kepada Deputi Bidang Kemaritiman tersebut menjadi masukan/*input* dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet. Oleh karena itu, *output* Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga dihitung sebagai *outcome*, dengan rincian: rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 103 berkas; rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan

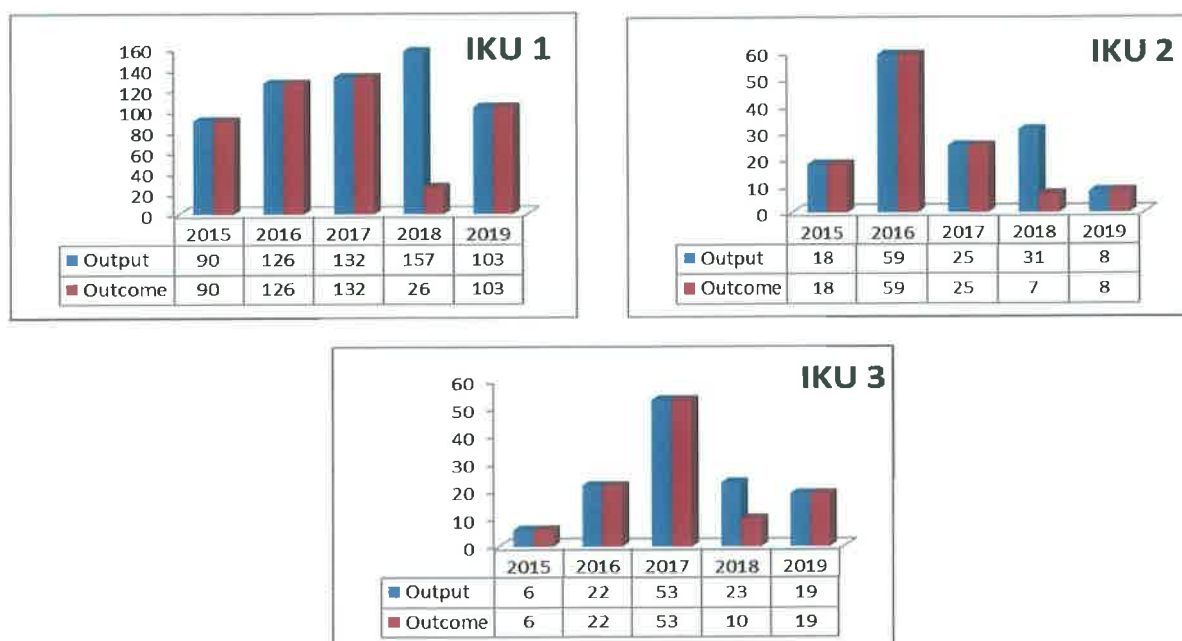
maritim sebanyak 8 berkas; dan rancangan rekomendasi terkait materi kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 19 berkas.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi Output
1	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	103 berkas
2	Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	8 berkas
3	Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	19 berkas
<b>Total</b>		<b>130 berkas</b>

Sejak terbentuknya Deputi Bidang Kemaritiman di tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 547 *output*, dengan rincian sebagai berikut:

**Grafik 3.1**  
**Realisasi Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015-2019**



## 2. Gambaran Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim pada Masing-masing Indikator Kinerja

Gambaran capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dapat dijabarkan sebagai berikut:

### a. Indikator I: Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim

Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 103 berkas rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran Indikator I Tahun 2019**

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100% 103 Rekomendasi	100%

Dalam kurun waktu Januari – Desember 2019 terdapat 103 berkas yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, artinya 103 berkas rekomendasi tersebut 100% telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau telah disampaikan kepada pihak lain (Deputi lain, Kementerian dan Lembaga, dan *stakeholder* lain) serta telah disetujui, direspon, dan dimanfaatkan. Capaian tersebut selalu dimonitor melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) secara triwulanan. Berikut dashboard SIKT Asisten Deputi

Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tahun 2019:



**Gambar 3.1**

Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk Indikator Persentase Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim diantaranya:

**I. Progress Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang)**

Dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 23 April 2019, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan fokus pada 4 (empat) dari 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas yang sudah ditetapkan di tahun 2015. Keempat destinasi tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo, yang diharapkan dapat selesai penataannya di tahun 2020. Di bulan Juli 2019, Presiden melakukan kunjungan ke Likupang, Sulawesi Utara, dan pada Rapat Terbatas yang diadakan di VIP Room Bandara Sam Ratulangi, Presiden memberikan arahan agar Likupang dapat ditetapkan sebagai KEK pariwisata. Kelima destinasi tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas tanggal 15 Juli 2019, dimana pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di lima destinasi tersebut dapat diselesaikan di tahun 2020.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di

Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, yang antara lain mengintruksikan bahwa Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas, dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi, Kedepujian Bidang Kemaritiman telah melakukan pengawasan dan mengawal progres pembangunan infrastruktur di 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas, diantaranya:

i. Borobudur

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur pada tanggal 19 Juni 2019 di Semarang, Jawa Tengah. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, dan BOP Borobudur. Rapat membahas dan menyimpulkan:

- a. Kementerian Pariwisata agar mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana amanat Pasal 20 Perpres Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur sebagai dasar K/L dan Pemda dalam penyusunan program/kegiatan
- b. Perlu ada kesesuaian antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Purworejo dengan rencana induk dan rencana detail Kawasan Pariwisata Borobudur
- c. Masih terdapat permasalahan sampah yang belum terselesaikan yang ditimbulkan oleh kunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang (TPA eksisting sudah tidak dapat menampung sampah)

Hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Seskab nomor M-797 tanggal 30 Agustus 2019 sebagai rekomendasi Sekretariat Kabinet sebelum kunjungan Presiden dan Rapat Terbatas tanggal 30 Agustus 2019 di Magelang, Jawa Tengah.



**Gambar 3.2**

Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur

ii. Labuan Bajo

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam kunjungan ke Labuan Bajo tanggal 10-11 Juli 2019 dan pada Rapat Terbatas tanggal 15 Juli 2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 16 Juli 2016. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, dan BOP Labuan Bajo Flores. Rapat membahas dan menyimpulkan:

- a. Kementerian Pariwisata agar mempercepat penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana amanat Pasal 20 Perpres Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai dasar K/L dan Pemda dalam penyusunan program/kegiatan;
- b. Penetapan RPerpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Komodo dan revisi Perda RTRW Provinsi NTT dan Perda RTRW Kabupaten Manggarai;
- c. Perlu dilakukan kajian mengenai *carrying capacity*; dan
- d. Pengembangan destinasi pariwisata potensial.



Hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada K/L terkait melalui Surat Seskab nomor B-279/Seskab/Maritim/08/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Dukungan Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo.



**Gambar 3.3**

Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas 15 Juli 2019 Terkait Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo

iii. Mandalika

Selain menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, Mandalika juga ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan Moto GP 2021, yang pertama kali akan diadakan di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Mandalika perlu segera diselesaikan sebelum pelaksanaan Moto GP 2021, terutama infrastruktur akomodasi dan konektivitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 8 Juli 2019 di Hotel Lombok Raya. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Nusat Tenggara Barat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, dan PT. ITDC selaku pengelola KEK Mandalika. Rapat membahas dan menyimpulkan:

- a. Kementerian PUPR agar mempercepat pembangunan jalan *bypass* dari Bandara Internasional Lombok ke KEK Mandalika (sudah dianggarkan tahun 2020) dan mengkaji program/kegiatan

- pelebaran jalan provinsi dalam kawasan KEK Mandalika (Bundaran Sumbu);
- b. Kementerian Kesehatan dan Pemprov NTB, sesuai kewenangannya mempercepat pembangunan Rumah sakit bertaraf internasional; dan
  - c. Kementerian Perdagangan dan Pemkab Lombok Tengah, sesuai kewenangannya mengkaji program/kegiatan penataan Pasar Sengkol yang berada pada jalan akses menuju KEK Mandalika.

Hasil rapat tersebut menjadi masukan dalam penyiapan bahan Rapat Terbatas untuk Presiden, salah satunya pada Rapat Terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas tanggal 21 November 2019.



**Gambar 3.4**

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim memimpin Rapat Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika dan Labuan Bajo

iv. Danau Toba

Selama 3 hari (29-31 Juli 2019) Presiden melakukan kunjungan Sumatera Utara, dengan fokus mengunjungi Danau Toba sebagai lokasi wisata unggulan. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pengembangan pariwisata di sekitar Danau Toba dilakukan parallel, antara atraksi, infrastruktur, akomodasi, lingkungan, dan SDM. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengadakan rapat dengan mengundang Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim pada tanggal 6 September 2019

di Institut Teknologi Del, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dihadiri oleh Menteri Pariwisata, perwakilan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN), BOP Danau Toba, perwakilan pemerintah daerah (Bupati Toba Samosir, Bupati Humbang Hasundutan, wakil Bupati Samosir, Bupati Aceh Singkil, Pemda Tapanuli Utara, Kapolres Toba Samosir, Rektor Institut Teknologi Del), dan Konsultan Penyusun *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) Danau Toba. Rapat membahas dan menyimpulkan:

- a. Terkait penyelesaian status LZO, Direktur Utama BPO-DT akan menyurati Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK, untuk memberikan klarifikasi tertulis atas status hukum lahan zona otorita dimaksud, sehingga BPN dapat segera melanjutkan proses sertifikasi HPL pada lahan 107 Ha;
- b. Terkait rencana pembangunan trase jalan, BPHP Wilayah II Medan akan melakukan survey guna menentukan penerbitan hak akses penebangan pohon pinus, dengan target penerbitan hak akses dimaksud maksimal pada September 2019;
- c. Pengembangan KSPN Danau Toba dilaksanakan secara terintegrasi (baik infrastruktur dan pengembangan SDM) untuk dapat meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat; dan
- d. Guna kondusifitas di lapangan pada pelaksanaan *groundbreaking*, Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana penanganan dampak sosial.

Hasil rapat tersebut menjadi masukan dalam penyiapan bahan Rapat Terbatas untuk Presiden, salah satunya pada Rapat Terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas tanggal 21 November 2019.



**Gambar 3.5**

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kawasan Pariwisata Danau Toba

v. Likupang

Pada tanggal 4-5 Juli 2019, Presiden melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Tanjung Pulisan, Likupang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memimpin Rapat Terbatas di VIP Lounge Bandara Sam Ratulangi Manado dan memberikan arahan kepada K/L untuk membangun pariwisata di Likupang, salah satunya melalui pembentukan KEK. Menindaklanjuti arahan tersebut, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juli 2019. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan Sekretariat Dewan Nasional KEK. Rapat membahas dan menyimpulkan:

- a. Kementerian Perhubungan melakukan percepatan pengembangan Bandara Sam Ratulangi, meliputi perpanjangan runway, perluasan terminal, dan perluasan parkir guna mengantisipasi kenaikan jumlah wisatawan (kondisi saat ini panjang runway bandara sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar dan luas terminal sudah dapat menampung 2,5 juta penumpang/tahun, serta rencana perluasan terminal nantinya akan dapat menampung 10 juta penumpang/tahun);

b. Kementerian PUPR melakukan percepatan pembangunan embung di Likupang dan Bunaken sebagai sumber air baku, pembangunan jembatan Bitung-Pulau Lembeh (sedang dilakukan review FS), berkoordinasi dengan pemda terkait proses percepatan pembebasan lahan jalan tol Manado-Bitung di segmen 2, dan pelebaran jalan nasional Bitung-Likupang.

Hasil rapat tersebut menjadi masukan dalam penyiapan bahan Rapat Terbatas untuk Presiden, salah satunya pada Rapat Terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas tanggal 21 November 2019.



**Gambar 3.6**

Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Tanggal 5 Juli 2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pariwisata di Sulawesi Utara

## **II. Event Pariwisata Nasional**

Sepanjang tahun 2019 terdapat beberapa event pariwisata, namun ada 2 (dua) event berskala nasional yang melibatkan K/L pusat dan pemerintah daerah, yaitu Sail Nias 2019 dan Hari Nusantara 2019.

### **i. Sail Nias 2019**

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan surat Permohonan Dukungan Pelaksanaan Sail Nias (B0001/MENKO/MARITIM/UM.03.00/II/2019). Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum kepada Sekretaris Kabinet nomor M-52/Maritim/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 agar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

mempersiapkan kegiatan sail lebih awal, sejalan dengan arahan Presiden pada Sail Tomini 2015 dan Sail Karimata 2016. Arahan tersebut kemudian disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat nomor B-44/Seskab/Maritim/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Persiapan Pelaksanaan Sail Nias 2019.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengeluarkan Keputusan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Nias 2019, dimana Deputi Bidang Kemaritiman ditetapkan sebagai Wakil Ketua III untuk Bidang Acara Puncak. Selain itu, Sekretaris Kabinet menjadi anggota Panitia Pengarah, dan Wakil Sekretaris Kabinet sebagai Sekretaris II Panitia Pelaksana Pusat.

Acara puncak Sail Nias 2019 dilaksanakan pada tanggal 14 September 2019 di Pelabuhan Baru Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (mewakili Presiden). Rangkaian kegiatan pada puncak acara Sail Nias 2019, diantaranya :

- a. Wonderful Nias Expo, di Lapangan Orurusa;
- b. Grand Final Surfing Nias Pro 2019, di Pantai Sorake; dan
- c. Festival Kopi Nusantara di Taman Ya'ahowu, Kota Gunung Sitoli.

Melalui kegiatan Sail Nias 2019, yang bertema "Nias menuju Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia", pemerintah bertekad untuk memajukan sektor pariwisata di Nias. Terkait hal tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mendukung dan bersinergi terhadap segala upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Nias

Selain itu, menindaklanjuti arahan Presiden terkait pelaksanaan kegiatan Sail (kegiatan sail agar berdampak pada peningkatan perekonomian bagi daerah setempat; kegiatan Sail agar tidak bersifat seremonial semata), dalam pelaksanaan Sail Nias 2019 dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur, antara lain pemeliharaan jalan nasional dan jembatan dari Kota Gunung Sitoli menuju Kabupaten Nias Selatan, Penyediaan lampu jalan tenaga surya pada ruas jalan antara Teluk Dalam dan Pantai Sorake, penataan kawasan

- Pelabuhan Teluk Dalam (pembangunan toilet, mushola, sistem penyediaan air minum [SPAM], renovasi bangunan ruang tunggu pelabuhan, penataan pelataran panggung utama, pemasangan *paving block*), dan penataan kawasan Pantai Sorake;
- b. Renovasi sarana-prasarana, seperti sekolah, rumah ibadah, puskesmas;
  - c. Bakti Kesehatan (pelayanan kesehatan umum dan gigi, sunatan masal, bedah minor, donor darah, pembagian kaca mata baca dan peralatan kebersihan);
  - d. Terciptanya rute baru kunjungan kapal yacht asing, melalui *event* Nias *Yacht Rally*;
  - e. Penguatan jaringan internet;
  - f. Pelatihan *hospitality* bagi masyarakat pelaku pariwisata (hotel, restoran).

Laporan pelaksanaan rangkaian kegiatan acara puncak Sail Nias 2019 telah disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman pada Wakil Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M-347/Maritim/09/2019 tanggal 25 September 2019.



**Gambar 3.7**

Wakil Sekretaris Kabinet bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur Sumatera Barat menghadiri Acara Puncak Sail Nias 2019

ii. Hari Nusantara 2019

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 173 Tahun 2019 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim ditunjuk sebagai anggota Bidang Acara Puncak, yang bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan acara puncak Hari Nusantara 2019 tingkat nasional dengan Panitia Pelaksana Pusat dan Panitia Pelaksana Daerah dan melaksanakan kegiatan acara puncak Hari Nusantara 2019 tingkat nasional tanggal 13 Desember 2019 di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Tema peringatan Hari Nusantara tingkat nasional 2019 adalah *"Nusantaraku Berdaulat, Indonesiaku Maju"*, diselenggarakan di Pantai Gandoriah, Kota Pariaman, Sumatera Barat dan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mewakili Presiden RI.



**Gambar 3.8**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memberikan Keterangan Pers pada Acara Puncak Hari Nusantara 2019

**b. Indikator II: Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim**

Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 8 berkas rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin



prakarsa dan substansi rancangan PUU yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Sasaran Indikator II Tahun 2019**

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100% 8 Rekomendasi	100%

Dalam kurun waktu Januari – Desember 2019 terdapat 8 berkas yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, artinya 8 berkas rekomendasi tersebut 100% telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau telah disampaikan kepada pihak lain (Deputi lain, Kementerian dan Lembaga, dan *stakeholder* lain) serta telah disetujui, direspon, dan dimanfaatkan. Capaian tersebut selalu dimonitor melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) secara triwulanan. Berikut dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tahun 2019:

Indikator: Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman



**Gambar 3.9**  
Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk Indikator Persentase Rancangan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim diantaranya:

#### **I. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru**

Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 16 November 2017 di Istana Bogor tentang Pengembangan 10 Bali Baru (10 Destinasi Pariwisata Prioritas) memberikan arahan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk melakukan percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, termasuk di dalamnya pengembangan destinasi wisata Bromo-Tengger-Semeru.

Sebagaimana arahan Presiden agar pengelolaan destinasi pariwisata menerapkan prinsip *Single Destination Single Management*, destinasi Bromo-Tengger-Semeru sedang dalam proses pembentukan Badan Otorita Pariwisata selaku pengelola destinasi. Rancangan Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan BOP telah disiapkan sejak akhir tahun 2018 dan harmonisasinya berlanjut di tahun 2019. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru tanggal 23 Januari 2019. Rapat tersebut diadakan untuk membahas finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang BOP Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, dan Tim Percepatan DPP. RPerpres yang dibahas pada rapat tersebut kemudian disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pariwisata, Menteri LHK, Menteri ATR/BPN, dan Menteri PAN-RB perihal Permohonan Paraf Persetujuan atas Rancangan Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo Tengger Semeru (surat nomor B-39/Seskab/maritim/01/2019 tanggal 29 Januari 2019).

Menanggapi surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan surat Nomor S.148/Menlhk/Setjen/KSA.3/3/2019 tanggal 20 Maret 2019.

Menindaklanjuti tanggapan Menteri LHK, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan Rapat Pembahasan Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas RPerpres Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru tanggal 2 April 2019. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.



**Gambar 3.10**

Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Pembahasan Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas RPerpres Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru tanggal 2 April 2019

## **II. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi**

Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Destinasi Prioritas Danau Toba tanggal 2 Februari 2016 menyampaikan arahan agar pengelolaan destinasi pariwisata menerapkan prinsip *Single Destination Single Management*. Salah satu destinasi yang akan dibentuk kelembagaannya adalah Wakatobi.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat Permohonan Paraf Persetujuan atas Rancangan Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi (nomor B-40/Seskab/maritim/01/2019 tanggal 29 Januari 2019) kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pariwisata, Menteri LHK, Menteri ATR/BPN, dan Menteri PAN-RB.

Menanggapi surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan surat nomor HK.02.01/484-100/IV/2019 tanggal 1 April 2019 untuk menyampaikan masukan berupa usulan perubahan maupun

penambahan materi atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi. Usulan tersebut kemudian dikaji oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan diputuskan dapat diakomodir dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi. Namun demikian, terkait pengelolaan SDM BOP Wakatobi, sebagaimana BOP Bromo-Tengger-Semeru, terdapat masukan dari Kementerian PAN-RB (surat nomor Nomor B/1029/M.KT.01/2019 tanggal 18 Oktober 2019). Oleh karena itu, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan rapat dengan mengundang perwakilan Kementerian PAN-RB pada tanggal 1 November 2019 untuk membahas hal tersebut. Kesepakatan rapat kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru untuk dimintakan paraf ulang, sebagaimana disampaikan dalam surat Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kementerian PAN-RB (surat nomor B.929/Maritim/11/2019 tanggal 7 November 2019).



**Gambar 3.11**  
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim memimpin Rapat Pembahasan Tanggapan Kementerian PAN-RB atas RPerpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan RPerpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi

**c. Indikator III: Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 19 berkas rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan dimanfaatkan dan/atau diterima oleh Presiden, dan/atau Wakil Presiden sebagai bahan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, ataupun pertemuan lainnya.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Sasaran Indikator III Tahun 2019**

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100% 19 Rekomendasi	100%

Dalam kurun waktu Januari – Desember 2019 terdapat 19 berkas yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, artinya 19 berkas rekomendasi tersebut 100% telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau telah disampaikan kepada pihak lain (Deputi lain, Kementerian dan Lembaga, dan *stakeholder* lain) serta telah disetujui, direspon, dan dimanfaatkan. Capaian tersebut selalu dimonitor melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) secara triwulanan. Berikut dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tahun 2019:



**Gambar 3.12**

Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk Indikator Persentase Rancangan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim diantaranya:

#### **I. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas di Bidang Pariwisata**

Pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan konektivitas. Sepanjang tahun 2019, telah diadakan 4 (empat) kali Rapat Terbatas/Sidang Kabinet yang secara spesifik membahas isu pariwisata, yaitu:

- a) Rapat Terbatas tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pariwisata di Sulawesi Utara (tanggal 5 Juli 2019 di VIP Room Bandara Sam Ratulangi Sulawesi Utara);
- b) Rapat Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (tanggal 15 Juli 2019 di Kantor Presiden, Jakarta);
- c) Rapat Terbatas tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur (tanggal 30 Agustus 2019 di Hotel Plataran, Magelang, Jawa Tengah); dan
- d) Rapat Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (21 November 2019 di Kantor Presiden, Jakarta).

Selain keempat Rapat Terbatas diatas, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga ikut menyiapkan bahan untuk Rapat Terbatas/Sidang Kabinet yang

membahas isu yang lebih luas, namun masih berkaitan dengan bidang pariwisata, diantaranya:

- a) Rapat Terbatas tentang Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana (tanggal 14 Januari 2019 di Kantor Presiden, Jakarta);
- b) Sidang Kabinet Parpurna tentang Program dan Kegiatan Tahun 2019 (tanggal 7 Januari 2019 di Istana Negara); dan
- c) Rapat Terbatas tentang Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Presiden RI ke Saudi Arabia (tanggal 18 April 2019 di Istana Merdeka)

Sesuai tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melakukan penyiapan analisis dan pengolahan materi untuk pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, diantaranya:

- a) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tanggal 9 Februari 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya;
- b) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) tanggal 8 April 2019 di Gedung Sapta Pesona (diwakili oleh Menteri Pariwisata);
- c) Pertemuan Presiden dengan Direktur Utama PT ITDC (Persero) tanggal 7 Agustus 2019 di Kantor Presiden (didampingi oleh Sekretaris Kabinet);
- d) Festival Tabut 2019 tanggal 31 Agustus 2019 di Bengkulu (diwakili oleh Menteri Pariwisata);
- e) Acara Puncak Sail Nias 2019, tanggal 14 September 2019 di Kabupaten Nias, Sumatera Utara (diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman); dan
- f) Hari Nusantara 2019, tanggal 13 Desember 2019 di Kota Pariaman, Sumatera Barat (diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)



**Gambar 3.13**

Presiden menerima anugerah penghargaan sebagai Bapak Pariwisata Nasional, yang diserahkan pada Gala Dinner Peringatan HUT ke-50, di Hotel Grand Sahid Jaya

#### **d. Kegiatan Pendukung Pencapaian Output**

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka koordinasi dengan K/L terkait maupun pengumpulan data dan penjarangan *expert opinion*. Kegiatan yang dilakukan berupa *focus group discussion* (FGD) maupun rapat koordinasi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

**Tabel 3.6**

#### **Kegiatan Pendukung Pencapaian Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019**

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	23 Januari 2019
2.	Rapat Pembahasan Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Rperpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	2 April 2019
3.	Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Acara Puncak Sail Nias 2019	15 Mei 2019
4.	Rapat Pembahasan Pengembangan 4 (Empat) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika)	16 Mei 2019
5.	Rapat Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur	19 Juni 2019
6.	Rapat Rencana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Bidang Pariwisata	24 Juni 2019
7.	FGD tentang Pengembangan Vokasi untuk	24 Juni 2019



Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha		
8.	Rapat Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika dan Labuan Bajo	8 Juli 2019
9.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Tanggal 5 Juli 2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pariwisata di Sulawesi Utara	24 Juli 2019
10.	Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Sail Indonesia	23 Oktober 2019
11.	Rapat Pembahasan Tanggapan Kementerian PAN RB atas RPerpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan RPerpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi	1 November 2019
12.	FGD Percepatan Perizinan Pembangunan Kawasan Pariwisata yang Menggunakan Kawasan Hutan Negara	11 November 2019
13.	Rapat dan Tinjauan Lapangan Tindak Lanjut Pelaksanaan Sail Sabang	28 November 2019
14.	FGD Percepatan Pembangunan Kawasan Pariwisata Melalui Kemudahan Perolehan Izin Lingkungan	4 Desember 2019
15.	FGD Percepatan Pembangunan Kawasan Pariwisata Melalui Kemudahan Perolehan Hak Atas Tanah	5 Desember 2019
16.	Rapat dan Tinjauan Lapangan Tindak Lanjut Pelaksanaan Sail Karimata	17 Desember 2019
17.	FGD tentang Penyusunan Kajian Isi dan Permasalahan Kualifikasi Angkatan Kerja dan Pasar Tenaga Kerja Kepariwisata Guna Mendukung Peningkatan Daya Saing Pariwisata di Bidang Sumber Daya Manusia	23 Desember 2019

#### 4. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data diperoleh dari arsip tahun 2019 yang berada di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan di Tata Usaha Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik, yaitu melalui Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT). Data di kelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, diantaranya berkas/memo kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan

jaman dan alat tulis kantor, dan penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Dalam laporan kinerja ini, yang digunakan adalah data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi.

## **B. Analisis Penggunaan Sumber Daya**

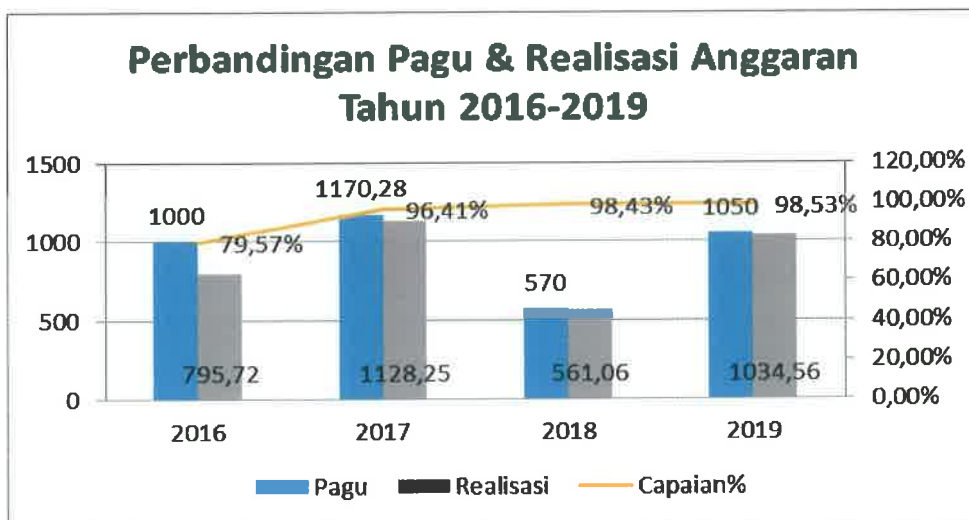
Analisis penggunaan sumber daya dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas penggunaan sumber daya, baik anggaran, SDM, maupun sarana dan prasarana di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 bagian yaitu analisis penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang ketiganya merupakan faktor penting pelaksanaan kinerja.

### **1. Analisis Penggunaan Anggaran**

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim pada tahun 2019 telah didukung oleh pagu anggaran berjumlah Rp 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) untuk program “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim”.

Total realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2019 mencapai Rp 1.034.563.545,- (satu miliar tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), atau mencapai 98,52% dari total pagu anggaran tahun 2019, naik 0,09% dari realisasi anggaran tahun 2018 (98,43%).

**Diagram 3.1**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019**



Berdasarkan grafik diatas, pagu anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berfluktuasi selama 4 tahun terakhir, dengan pagu terendah di tahun 2018. Pada tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mendapatkan anggaran sebesar Rp 950.000.000, Namun pada awal tahun 2018, dilakukan revisi anggaran sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dikarenakan ada kenaikan tunjangan kinerja pegawai sehingga anggaran dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan dalam hal penyerapan anggaran, dimana penyerapan terendah terjadi di tahun 2016 (79,57%), dan naik 18,96% di tahun 2019 menjadi 98,53%.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dari pencapaian target. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*), semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif program dan kegiatan yang dilakukan. Efisiensi merupakan hubungan antara output yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Program dan kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan *input* serendah-rendahnya atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Efektivitas diukur dengan membandingkan pagu anggaran dengan realisasi, semakin sedikit sisa anggaran maka kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran banyak maka kinerja suatu instansi kurang baik karena rencana kerja yang dilakukan kurang maksimal.

Di tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim ditargetkan untuk menghasilkan 118 output dengan anggaran sebesar Rp 1.050.000.000 (berdasarkan RAB Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun Anggaran 2019). Dalam realisasinya, di tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menghasilkan 130 output dengan menggunakan anggaran Rp 1.034.563.545. Output yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan target, sementara anggaran yang digunakan mencapai 98,52% dari total pagu anggaran tahun 2019, sehingga kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat dinilai efektif dan efisien berdasarkan penggunaan anggaran dalam menghasilkan output untuk mencapai tujuan.

## **2. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2019, jumlah pegawai Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah 13 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 10 Orang dan staf analis sebanyak 3 orang. Selain itu Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 1 orang.

Peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam rangka membantu Deputi Bidang Kemaritiman telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.

2. Munculnya isu-isu penting bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

### **3. Analisis Penggunaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim diantaranya adalah layar komputer, CPU, printer, meja dan kursi kerja, kubikel, dan lemari kabinet. Selain itu, terdapat juga sarana dan prasarana yang digunakan bersama-sama (*shared usage*), seperti mesin fotokopi, dispenser, kulkas, ruang tamu, mushala, kamar mandi, dan *pantry*. Kondisi sarana dan prasarana tersebut rata-rata cukup baik, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan, seperti CPU dan printer yang lambat dan mesin fotokopi yang rusak. Hal tersebut berpengaruh terhadap kecepatan bekerja para pegawai Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Selama bulan September-November 2019, ruang kerja Kedeputan Bidang Kemaritiman, termasuk pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengalami renovasi. Renovasi tersebut merupakan arahan Sekretaris Kabinet yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang lebih terbuka guna meningkatkan kinerja pegawai. Tata ruang kantor merupakan cara pengaturan semua sarana dan prasarana yang dimiliki kantor di dalam ruangan yang tersedia agar dapat digunakan dengan maksimal oleh pegawai. Tata ruang kantor harus diatur dengan sebaik mungkin berdasarkan prinsip penataan layout yang efektif sesuai dengan kebutuhan pegawai. Kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh faktor sistem penataan tata ruang kantor tempat mereka bekerja, kantor dapat membuat para pegawai nyaman dengan tata ruang kantor yang mereka tempati setiap hari atau justru sebaliknya pegawai merasa sesak dan bosan. Selain itu, motivasi kerja melalui intensitas interaksi yang diberikan oleh pimpinan akan mempengaruhi kemampuan pegawai dalam mencapai hasil

kerja yang maksimal. Untuk itu diharapkan tata ruang yang baru nantinya lebih memudahkan interaksi setiap pegawai dan juga interaksi dengan pimpinan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Di tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 130 output yang disampaikan baik kepada Deputi Bidang Kemaritiman maupun unit kerja lain di dalam dan di luar Sekretariat Kabinet. Output yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman kemudian dimanfaatkan oleh Deputi dalam pengambilan keputusan ataupun diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2019 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim ke depan, aspek perencanaan, pengelolaan administrasi tata usaha dan dokumen perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi

berbagai permasalahan, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

## **B. Rekomendasi**

Sebagai unit eselon II, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, SDM yang ada agar lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Pembenahan administrasi persuratan di tingkat eselon II dan administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen melalui aplikasi Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) agar dilaksanakan dengan lebih teratur dan disiplin.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2019 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim ke depan, aspek perencanaan, pengelolaan administrasi tata usaha dan dokumen perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.




## **B. Rekomendasi**

Sebagai unit eselon II, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, SDM yang ada agar lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Pembenahan administrasi persuratan di tingkat eselon II dan administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen melalui aplikasi Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) agar dilaksanakan dengan lebih teratur dan disiplin.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.

## LAMPIRAN

### 1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

 <b>SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA</b>	
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019</b>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama : Mohamad Arief Khumaldi, S.E., S.S., M.H.	
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	
selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.	
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman	
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.	
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Pihak Kedua, Deputi Bidang Kemaritiman	Jakarta, Januari 2019 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim
 Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.	 Mohamad Arief Khumaldi, S.E., S.S., M.H.

**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019  
ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN  
LINGKUNGAN MARITIM**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.838.716.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.157.724.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan L	Rp.53.560.000,-
Total Anggaran	Rp.1.050.000.000,-

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan,  
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan  
Maritim

  
Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si

  
Mohamed Arief Khumaldi, S.E., S.S., M.H

2. Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
1	Penyampaian Data Investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	44.(2018)	1/26/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
2	Laporan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba	24.(2018)	1/15/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	265	Seskab	OUTCOME IKK 1
3	Laporan Rakor Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Borobudur	61.(2018)	2/13/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	454	Seskab	OUTCOME IKK 1
4	Laporan Rapat Teknis Persiapan Rakor Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Borobudur	56.(2018)	2/7/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
5	Laporan menghadiri FGD "Pelayanan Kepabeanan, Imigrasi, karantina dan Kepelembuhan terhadap Kedatangan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia	125.(2018)	3/27/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
6	Laporan Rapat Pembahasan Perubahan Regulasi Fasilitas Fiskal Di Kawasan Ekonomi Khusus	121.(2018)	3/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
7	Laporan Rapat Koordinasi tentang Teknis Penetapan Lahan Otoritatif Badan Otorita Pariwisata Dana Borobudur	118.(2018)	3/22/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
8	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan RPerpres badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan Wakatobi	92.(2018)	3/5/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
9	Laporan rapat progres 4 destinasi pariwisata prioritas	178.(2018)	4/26/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
10	Laporan kesiapan sektor pariwisata dalam penyelenggaraan Annual Meetings IMF-World Bank Tahun 2018 (AM 2018)	150.(2018)	4/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
11	Laporan menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan Kerja Rencana Kebijakan sesuai Persekab Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 22 Maret di Makassar	133.(2018)	4/2/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
12	Penyampaian Bahan Rapat mengenai Progress Destinasi Pariwisata Prioritas (Selasa, 24 April 2018 pk. 09.00)	173.(2018)	4/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
13	Penyampaian Bahan Rapat dan permohonan Tanda Tangan Surat Undangan Rapat mengenai Progres Destinasi Pariwisata Prioritas (Senin, 23 April 2018, Pk. 14.00)	167.(2018)	4/18/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
14	Permohonan bantuan Dana Pembangunan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara	134.(2018)	4/2/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
15	Laporan Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	199.(2018)	5/14/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
16	Laporan Rapat Koordinasi tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur	214.(2018)	5/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
17	Laporan Rapat Koordinasi Mekanisme Pembelian Lahan Sawah dengan Tingkat Kesuburan Tinggi, Dekat dengan Jalan Utama serta Memiliki Nilai Pendukung Pariwisata (Sawah Subak) oleh Kementerian ATR/BPN	211.(2018)	5/22/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
18	Laporan Rapat Format Pelaporan Progress Destinasi Pariwisata Prioritas	219.(2018)	5/25/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
19	Laporan Rapat Pembahasan Tanggapan K/L terhadap draft RPerpres tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional	201.(2018)	5/16/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
20	Laporan Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Wakatobi	200.(2018)	5/14/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
21	Laporan Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	218.(2018)	5/25/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
22	Penyampaian Artikel Puasa Ramadhan dan Upaya Meredam Sikap Radikal	222.(2018)	6/1/2018	Asdep Humas dan Protokol			OUTCOME IKK 1
23	Penyampaian Kerangka Acuan Kegiatan Pemantauan "Ketersediaan Homestay dan Pasar Cinderamata Sebagai Faktor Sukses Pengembangan Pariwisata"	237.(2018)	6/28/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
24	Penyampaian Bahan Rapat Progress Pembangunan Infrastruktur di Destinasi Pariwisata Prioritas: Labuan	272.(2018)	7/25/2018	Deputi Bidang			OUTCOME IKK 1

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
	Bajo Flores dan Mandalika			Kemaritiman			
25	Penyampaian bahan audiensi Waseskab dengan pemprov NTB terkait Sail Moyo Tambora 2018	256.(2018)	7/13/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
26	Permohonan Audiensi Pengasuh Majalah Asrinesia (Indonesia Asri)	241.(2018)	7/5/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1760	Seskab	OUTCOME IKK 1
27	Laporan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Untuk Kawasan Pariwisata Borobudur	315.(2018)	8/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
28	Laporan Kegiatan Pemantauan Ketersediaan Homestay sebagai Faktor Sukses Pengembangan Pariwisata di kawasan Pariwisata Borobudur	309.(2018)	8/16/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
29	Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat	304.(2018)	8/13/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
30	Laporan Rapat Progress Pembangunan Infrastrukturu di Empat Destinasi Pariwisata Prioritas	278.(2018)	8/1/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
31	Penyampaian Bahan Paparan Rakor Tindak Lanjut PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (Kamis, 30 Agustus 2018 di Labuan Bajo)	325.(2018)	8/27/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
32	Penyampaian bahan rapat gempa Lombok	312.(2018)	8/20/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
33	Penyampaian Bahan Paparan Rapat Evaluasi Kesiapan Homestay dan Pasar Cinderamata dengan Desain Arsitektur Tradisional di Kawasan Pariwisata Borobudur	299.(2018)	8/8/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
34	Permohonan Bantuan Dana Kepada Presiden untuk Kegiatan Festival Keraton dan masyarakat Adat ASEAN ke-5 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur	286.(2018)	8/3/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
35	Usulan Menjadi Tuan Rumah Hari Nusantara Tahun 2018	351.(2018)	9/20/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
36	Laporan menghadiri FGD "Finalisasi persiapan BOP Bromo-Tengger-Semeru" dan FGD "Fasilitasi Persiapan BOP Wakatobi"	336.(2018)	9/4/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
37	Penyampaian Bahan Rapat Koordinasi lahan Badan	362.(2018)	9/26/2018	Deputi Bidang			OUTCOME IKK 1

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
	Otorita Pariwisata Borobudur			Kemaritiman			
38	Permohonan Dukungan Publikasi Buku "Incredible Indonesia - an Archipelago of Mostly Remaekable Islands"	333.(2018)	9/3/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2674	Seskab	OUTCOME IKK 1
39	Laporan Rapat Koordinasi lahan badan otorita borobudur sebagai tindaklanjut Perpres Nomor 46 tahun 2017 tentang badan otorita pengelola kawasan pariwisata Borobudur	372.(2018)	10/5/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
40	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Pulau Morotai (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)	368.(2018)	10/2/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
41	Penambahan Trip Tol Laut (Gerai Maritim) ke Kabupaten Pulau Morotai	425.(2018)	11/15/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
42	Permohonan Dukungan Dana Penyiapan dokumen Proyek untuk pengembangan kawasan pariwisata danau toba	414.(2018)	11/9/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
43	Penyampaian Data Dukungan Pariwisata terkait Permohonan bantuan Jembatan Rangka Baja di Morotai	407.(2018)	11/8/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
44	Penyampaian bahan rapat pembahasan lahan bop wakatobi	402.(2018)	11/2/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
45	Permohonan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan program kegiatan pariwisata tahun anggaran 2019	483.(2018)	12/31/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	-	Seskab	OUTCOME IKK 1
46	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata Menghadiri Pameran Pariwisata World Travel Market London 2018 (Inggris), Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations (Singapura), dan China Ineternational Travel Mart (Tiongkok)	475.(2018)	12/20/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	M-506	Seskab	OUTCOME IKK 1
47	Laporan Rapat Pleno AKhir Tahun 2018 Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kemendikbud (Tanggal 13 Desember 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)	462.(2018)	12/17/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
48	Permohonan Dukungan Dana Penyiapan Dokumen Proyek untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba	449.(2018)	12/6/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1



No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
49	Penyampaian Surat Menteri Pariwisata (Surat Nomor UM.303/25/15/MP/2018)	373.(2018)	10/5/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
50	Pernyataan Kesiapan Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Hari Nusantara di Kabupaten Banggai	429.(2018)	11/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
51	Perkembangan Persiapan Penyelenggaraan Hari Nusantara 2018	455.(2018)	12/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
52	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis	31.(2018)	1/22/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
53	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu	23.(2018)	1/15/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
54	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dalam Keadaan Tertentu	53.(2018)	2/6/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
55	Permohonan Tandan Tangan Otentifikasi dan Surat Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu	120.(2018)	3/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
56	Permohonan Paraf Persetujuan pada Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	116.(2018)	3/21/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	793	Seskab	OUTCOME IKK 2
57	Permohonan Tanda Tangan Otentifikasi dan Naskah Surat Pendistribusian Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata	95.(2018)	3/8/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
58	Pengundangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata	90.(2018)	3/5/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
59	Persandingan Tanggapan Kementerian/Lembaga Terhadap RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	176.(2018)	4/26/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
60	Penyampaian 7 (tujuh) Berkas Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Peraturan Presiden beserta Naskah Asli Peraturan Presiden Republik Indonesia yang Telah Ditantangani	168.(2018)	4/19/2018	Kepala Pustadin			OUTCOME IKK 2
61	Permohonan Tanda Tangan Otentifikasi dan Surat Distribusi Perpres Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	147.(2018)	4/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
62	Permohonan Tanda Tangan Surat Pengundangan Perpres No32 tahun 2018 tentang BOP Kawasan Pariwisata Labuan Bajo	143.(2018)	4/5/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
63	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	136.(2018)	4/2/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
64	RPerpres Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	203.(2018)	5/16/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
65	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	264.(2018)	7/20/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	221	Seskab	OUTCOME IKK 2
66	Permohonan Tanda Tangan Surat Pengundangan Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional	291.(2018)	8/7/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
67	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Pariwisata Bromo Tengger Semeru	399.(2018)	10/31/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
68	Laporan Hasil Rapat Finalisasi RPerpres BOP Wakatobi (Tanggal 5 November 2018 di Sekretariat Kabinet)	408.(2018)	11/8/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
69	Penyampaian Paparan Rapat Finalisasi RPerpres BOP Brno-Tengger-Semeru dan RPerpres BOP Wakatobi (26 Desember 2018 di Rupaat Lantai 2)	478.(2018)	12/21/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
70	Penyampaian Bahan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas di Bali Tanggal 22 Desember 2017	6.(2018)	1/4/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 3
71	Penyampaian Arahan Presiden Mengenai Momentum Asian Games XVIII untuk Promosi Pariwisata	94.(2018)	3/8/2018	Deputi Bidang			OUTCOME IKK 3

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
72	Permohonan Kunjungan Kerja Presiden ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat	140.(2018)	4/4/2018	Kemaritiman Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 3
73	Permohonan Kunjungan Kerja Presiden ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat	169.(2018)	4/19/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1130	Seskab	OUTCOME IKK 3
74	Permohonan Kehadiran Presiden Membuka Festival Seni Budaya IRAU di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Surat Nomor 005/1107/SETDA)	344.(2018)	9/14/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2603/M-1075	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 3
75	Penyampaian Data Dukungan Bahan Rapat Terbatas Mengenai Kesiapan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Penyelenggaraan Annual Meetings IMF- World Bank Tahun 2018	367.(2018)	10/2/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 3
76	Permohonan Bertemu Presiden dari CEO World Travel & Tourism Council	49.(2018)	1/31/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
77	Penyampaian Daftar Rencana Kegiatan Kementerian/Lembaga yang Memerlukan Kehadiran Presiden	46.(2018)	1/29/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTCOME IKK 1
78	Permohonan Kesiediaan Kehadiran Presiden pada Kegiatan Lokakarya Internasional dan Nasional, InaTEWS	40.(2018)	1/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
79	Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ke Jepang	29.(2018)	1/19/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
80	Usulan Lokasi Peringatan Hari Nusantara 2018	26.(2018)	1/16/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
81	Laporan Hasil Kunjungan Kerja Delegasi Indonesia ke Qatar	13.(2018)	1/5/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
82	Mohon Bantuan Pembangunan Viewing Platform Puncak Paku (Surat Bupati Pesisir Selatan)	89.(2018)	2/28/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
83	Laporan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ke Jenewa, Swiss	132.(2018)	3/29/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
84	Laporan Kegiatan Kunjungan Menteri Pariwisata ke	131.(2018)	3/28/2018	Deputi Bidang			OUTCOME IKK 1

NO	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
	Thailand			Kemaritiman			
85	Evaluasi pencapaian proyek strategis Nasional	122.(2018)	3/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
86	surat permohonan dari Walikota Sawahlunto	98.(2018)	3/13/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
87	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata pada Pameran Pariwisata FITUR Madrid 2018 dan 14th UNWTO Awards 2018	97.(2018)	3/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
88	Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2018 Bidang Pariwisata	229.(2018)	6/5/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTCOME IKK 1
89	Laporan proses penyelesaian situs Observatorium Nasional	174.(2018)	4/24/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
90	Laporan evaluasi kemajuan Proyek Strategis Nasional (PSN)	148.(2018)	4/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	986/M-408	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 1
91	Permohonan audiensi Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia (PKNI)	145.(2018)	4/6/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	943	Seskab	OUTCOME IKK 1
92	Permohonan Audiensi Yayasan Dharma Ayu Bahari Jaya	162.(2018)	4/16/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
93	Laporan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ke Sydney Australia	208.(2018)	5/18/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1443	Seskab	OUTCOME IKK 1
94	Laporan Seminar "Pembangunan dan Pelestarian laut sebagai Penyokong Utama Industri Pariwisata dengan Melibatkan Masyarakat" di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat tanggal 8 Mei 2018	204.(2018)	5/17/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
95	Laporan Menghadiri Kegiatan Sabang Marine Festival 2018	193.(2018)	5/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
96	Laporan Kepala BMKG ke New Zealand	217.(2018)	5/25/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
97	Support Data Capaian Kinerja Pemerintah Bidang Pariwisata	212.(2018)	5/22/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTCOME IKK 1

NO	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESMENT CAPAIAN
98	Pembentukan Satuan Tugas Infrastruktur Indonesia ke Afrika	207.(2018)	5/18/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1445/M-601	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 1
99	Laporan kunjungan kerja menteri Pariwisata Menghadiri Inaugural Flight Garuda Indonesia Rute Mumbai - Denpasar	206.(2018)	5/18/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1452/M-606	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 1
100	Laporan Capaian Kinerja Kabinet Kerja Selama 3.5 Tahun Kementerian Pariwisata	202.(2018)	5/16/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
101	Penyampaian bahan Audiensi Dharma Ayu Bahari jaya ke Waseskab	192.(2018)	5/9/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	172.1(2018)	Waseskab	OUTCOME IKK 1
102	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Sail Sabang 2017 dan Pengembangan Sabang International Marine Tourism Hub Port	225.(2018)	6/4/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
103	Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018	227.(2018)	6/4/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
104	Permohonan Sponsorship Festival Padang Melang 2018	234.(2018)	6/26/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
105	Penyampaian Bahan Audiensi Country Director World Bank Indonesia	230.(2018)	6/5/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1590	Seskab	OUTCOME IKK 1
106	Tindak Lanjut Hasil Audiensi Dharma Ayu Bahari Jaya	248.(2018)	7/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
107	Laporan Perjalanan Dinas Kunjungan Lapangan dan Persiapan Rapat Koordinasi Persiapan Sail Moyo Tambora 2018	244.(2018)	7/6/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
108	Permohonan Kehadiran Presiden untuk Meresmikan Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK)	273.(2018)	7/27/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2028/M-842	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 1
109	Penyampaian Konsep Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Sail Moyo Tambora 2018	265.(2018)	7/20/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
110	Permohonan Audiensi Gubernur NTB dengan Sekretaris Kabinet terkait Sail Moyo Tambora 2018	252.(2018)	7/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
111	Laporan Perjalanan Dinas Kepala LAPAN ke Kyoto dan	323.(2018)	8/24/2018	Deputi Bidang			OUTCOME IKK 1

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESMENT CAPAIAN
	Tokyo, Jepang			Kemaritiman			
112	Laporan Kepala Badan Meteorologi , Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ke Jenewa, Swiss	322.(2018)	8/24/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
113	Laporan Pelaksanaan Rapat koordinasi Persiapan Sail Moyo Tambora 2018	285.(2018)	8/3/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
114	Pelaksanaan Agenda Sail Moyo Tambora 2018	326.(2018)	8/27/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2350/M-970	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 1
115	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Koordinasi Bidang Acara Puncak Sail Moyo Tambora 2018 di Kementerian Perhubungan, tanggal 13 Agustus 2018	300.(2018)	8/13/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
116	Laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan peresmian monumen patung Garuda Wisnu Kencana	356.(2018)	9/25/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
117	Laporan Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Sail Moyo Tambora 2018	347.(2018)	9/17/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2602	Seskab	OUTCOME IKK 1
118	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Sail Moyo Tambora Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 dan 3 September 2018	334.(2018)	9/4/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
119	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Koordinasi Persiapan Sail Moyo Tambora 2018 (Pimpinan Rapat: Menteri Perhubungan)	331.(2018)	9/3/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
120	Laporan menghadiri Wonderful Indonesia Gastronomy Forum 2018	437.(2018)	11/27/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
121	Laporan Menghadiri Kegiatan Making Indonesia4.0 Session 3	463.(2018)	12/18/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
122	Laporan Pelaksanaan Rapat Usulan Lokasi Penyelenggaraan Hari Nusantara 2018	385.(2018)	10/19/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
123	Permohonan dukungan Penyelenggaraan acara/event di NTB Pascagempa (Surat nomor UM.303/25/15/MP/2018)	364.(2018)	10/1/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2718	Seskab	OUTCOME IKK 1
124	Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019	424.(2018)	11/15/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
125	Laporan rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Pengawasan Kualitas Lingkungan Berbasis ICT	420.(2018)	11/13/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
126	Laporan kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019	417.(2018)	11/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
127	Permohonan Audiensi Bupati Nias Selatan terkait Ya'Ahowu Festival 2018	403.(2018)	11/2/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	3100	Seskab	OUTCOME IKK 1
128	Laporan Perjalanan Dinas Kepala BAPETEN menghadiri Symposium on International Safeguards di Vienna AUstria tanggal 5-9 November 2018	480.(2018)	12/26/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
129	Laporan Pelaksanaan Acara Puncak Peringatan Hari Nusantara 2018 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah	474.(2018)	12/19/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
130	Percepatan Revitalisasi dan Reforestasi DAS Ciliwung	451.(2018)	12/6/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	M-503+	Seskab	OUTCOME IKK 1
131	Permohonan Keikutsertaan Kegiatan Belitung Timur Expo 2019	441.(2018)	11/29/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
132	Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Rekonstruksi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat	307.(2018)	8/16/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	312.(2018)	Deputi Bidang PMK	OUTCOME IKK 2
133	Penyampaian RPerseskab tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet	21.(2018)	1/9/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
134	Permohonan Paraf RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	165.(2018)	4/18/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
135	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan RPerpres BOP Bromo-Tengger-Semeru dan RPerpres BOP Wakatobi	481.(2018)	12/26/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
136	Laporan Hasil Pengecekan Data Spasial Lahan dalam Lampiran RPerpres BOP Wakatobi dan Lampiran RPerpres BOP Bromo-Tengger-Semeru (yang diusulkan dari Kemenko Bidang Kemaritiman) dengan Data yang dikelola oleh Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta	477.(2018)	12/21/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
137	Penyampaian Rekapitulasi Arahan Presiden di Bidang Kepariwisata Tahun 2015-2017	17.(2018)	1/8/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTCOME IKK 3
138	Permohonan kehadiran Presiden Tasyakuran Pembangunan Patung Garuda Wisnu Kencana	103.(2018)	3/16/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 3
139	Permohonan Sambutan dan Membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-40	93.(2018)	3/6/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	72.(2018)	Deputi Bidang PMK	OUTCOME IKK 3
140	Permohonan Audiensi Country Manager International Finance Corporation (IFC) dengan Sekretaris Kabinet	233.(2018)	6/26/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	224.(2018)	Deputi Bidang Perekonomian	OUTCOME IKK 3
141	Penyampaian bahan rapat terbatas Evaluasi Kemajuan Proyek Strategis Nasional (Senin, 16 April 2018, Pukul 15.00 WIB).	154.(2018)	4/13/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 3
142	Permohonan Kehadiran Presiden pada Kegiatan Sail Moyo Tambora 2018	249.(2018)	7/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1828/M-765	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 3
143	Penyampaian Butir Wicara Sambutan Presiden pada acara Peresemian Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK)	276.(2018)	7/31/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2083/M-866	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 2
144	Permohonan Kehadiran Presiden pada Pembukaan Sail Moyo Tambora 2018	337.(2018)	9/5/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2451/M-1009	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 3
145	Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Peringatan Hari Nusantara 2018 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Surat Nomor:050/4496/BAPPEDA, tanggal 21 November 2018)	439.(2018)	11/28/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 3
146	Perkembangan Laporan Kementerian Koordinator pada Kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam SITAP	484.(2018)	12/31/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
147	Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Peringatan Hari Nusantara 2018 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Surat Nomor: 003.1/10834/SJ, tanggal 5 Desember 2018)	452.(2018)	12/6/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	M-471	Seskab	OUTCOME IKK 3
148	Permohonan Tandatangani Naskah Surat Undangan dan Penyampaian Paparan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas di Bali	1.(2018)	1/2/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1



No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESMENT CAPAIAN
149	Laporan Rapat Pra Sosialisasi Inpres 7 Tahun 2017 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 serta Sistem Informasi Tindak lanjut Arahan Presiden (SITAP)	76.(2018)	2/20/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
150	Laporan Rapat Pembahasan Penyiapan Materi dan Teknis Sosialisasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018	72.(2018)	2/15/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
151	Laporan Rapat Persiapan Sosialisasi Perseskab Nomor 1 Tahun 2018	59.(2018)	2/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
152	Laporan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan	55.(2018)	2/7/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
153	Artikel Fenomena Alam Sebagai Obyek Wisata	50.(2018)	2/1/2018	Asdep Humas dan Protokol			OUTCOME IKK 1
154	Laporan Rapat Evaluasi Efektifitas Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional	124.(2018)	3/27/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
155	Laporan RDK Simulasi Kertas Kerja Rencana Kebijakan	106.(2018)	3/19/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
156	Laporan rapat tindak lanjut rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tanggal 16 April 2018	175.(2018)	4/24/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
157	Laporan kunjungan kerja Menteri Pariwisata pada Pameran Pariwisata Internationale Tourismus Borse (ITB) Berlin 2018	152.(2018)	4/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
158	Laporan menghadiri sosialisasi aplikasi OSS Kementerian Pariwisata tanggal 4 April 2018	146.(2018)	4/9/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
159	Laporan Mengikuti Presidential Lecture Dalam Rangka Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2017	141.(2018)	4/4/2018	Kepala Biro SDM dan Ortala			OUTCOME IKK 1
160	Laporan hasil Seminar "Potensi Pengembangan Wisata Olahraga (Sport Tourism) di Indonesia	191.(2018)	5/7/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
161	Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa	189.(2018)	5/7/2018	Deputi Bidang			OUTCOME IKK 1

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
	Persidangan IV Tahun Sidang 2017			Kemaritiman			
162	Penyampaian KAK dan RAB T. A. 2019	198.(2018)	5/14/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTCOME IKK 1
163	Laporan Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Provinsi Kalimantan Timur	221.(2018)	5/28/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
164	Penyampaian form register resiko dan rencana penanganannya risiko pada Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, ristik dan lingkungan maritim	216.(2018)	5/25/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTCOME IKK 1
165	Permohonan Revisi ke-2 POK Asdep Bidang Kepariwisata, Ristik dan Lingkungan Maritim Tahun Anggaran 2018	205.(2018)	5/17/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTCOME IKK 1
166	Laporan Rapat Rencana Pembentukan Desk Lintas Kedepuitan yang diperlukan	195.(2018)	5/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
167	Laporan Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Provinsi Kalimantan Timur	224.(2018)	6/4/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	274	Seskab	OUTCOME IKK 1
168	Laporan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba dan Badan Otorita Borobudur, serta Pembahasan Kawasan Wisata Mandeh dan KEK Pariwisata Mentawai di Sumatera Barat	231.(2018)	6/7/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
169	Bahan Rapat Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Tanggal 31 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB	275.(2018)	7/31/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTCOME IKK 1
170	Permohonan Audiensi General Manager Hotel Grand Keisha kepada Sekretaris Kabinet	246.(2018)	7/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1797	Seskab	OUTCOME IKK 1
171	Permohonan Bantuan Dukungan untuk Pelaksanaan Guinness World Record The Largest Poco-Poco Dance 2018 di Kawasan Istana Negara	271.(2018)	7/25/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
172	Laporan Perjalanan Dinas Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Kegiatan Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN 2018 tanggal 17 Juli 2018, di Sumenep Jawa Timur	266.(2018)	7/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
173	Laporan Rapat Tindak Lanjut Kajian Kelayakan Pengembangan Sabang International Marine Tourism Hub (Sabang Waterfront Harbour)	243.(2018)	7/6/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
174	Laporan Rapat Pembahasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan, Spam dan Jaringan Irigasi	247.(2018)	7/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
175	Usulan Langkah-langkah Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum	316.(2018)	8/24/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
176	Laporan Hasil Rakor Persiapan Penyelenggaraan Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN ke-V Tanggal 7 Agustus 2018 di kantor Staf Presiden	298.(2018)	8/8/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
177	Laporan Rapat Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK	282.(2018)	8/3/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
178	Laporan Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Legislative Drafting)	281.(2018)	8/2/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
179	Penyampaian Laporan Capaian Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla	353.(2018)	9/21/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	370.(2018)	Deputi Bidang Polhukam	OUTCOME IKK 1
180	Laporan Kunjungan Lapangan dan Pertemuan dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)	345.(2018)	9/14/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
181	Laporan Perjalanan Dinas menghadiri FGD "Dukungan Infrastruktur dalam pengembangan destinasi pariwisata nasional (DPN) Semarang-Karimunjawa dan Sekitarnya	338.(2018)	9/6/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
182	Rencana Pembangunan Hotel Saporo di Jakarta oleh MCAE Ekonomi Kreatif Konsultan	357.(2018)	9/25/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2675	Seskab	OUTCOME IKK 1
183	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk Mendukung Sektor Pariwisata	392.(2018)	10/25/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	3212	Seskab	OUTCOME IKK 1
184	Penyampaian bahan rapat koordinasi pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem terumbu karang untuk mendukung sektor pariwisata (Rabu 23 oktober 2018)	389.(2018)	10/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
185	Laporan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Sumatera Barat	386.(2018)	10/19/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
186	Laporan Rapat Dalam kantor Persiapan Rapat Koordinasi Pemanfaatan SDA Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk mendukung Sektor Pariwisata Tanggal 12 Oktober 2018	383.(2018)	10/16/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
187	Kerangka Kerja Acuan (KAK) Rapat Koordinasi Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk Mendukung Sektor Pariwisata	382.(2018)	10/16/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
188	Masukan terkait Penanganan Gempa dan Kepariwisataan di Sulawesi Tengah	366.(2018)	10/1/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2719	Seskab	OUTCOME IKK 1
189	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Special Side Event on Indonesia Ocean Day pada COP 24 di Katowice, Polandia	436.(2018)	11/27/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
190	Laporan Rapat Koordinasi Lanjutan Penyusunan Draft Perpres Penguatan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami	427.(2018)	11/19/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
191	Laporan Perkembangan Permohonan Tambahan Anggaran Badan Meteorologi , Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	418.(2018)	11/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	3204	Seskab	OUTCOME IKK 1
192	Laporan Kunjungan Ke Fasilitas Data Center PT. Telkom di Sentul , Jawa Barat tgl 7 November 2018	416.(2018)	11/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
193	Penyampaian Form Register Risiko, Rencana Penanganan Risiko, dan Peta Risiko pada Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Ristek dan Lingkungan Maritim	415.(2018)	11/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
194	Laporan Rapat Koordinasi Dukungan Anggaran Operasional Satuan Tugas Citarum Tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2018 di Bandung, Jawa Barat	401.(2018)	11/1/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
195	Laporan Rapat Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Pembahasan Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Hijau	482.(2018)	12/28/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
196	Laporan Rapat Tim Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional (Tekrafnas)	464.(2018)	12/18/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
197	Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan	446.(2018)	12/4/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
	Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2018						
198	Permohonan Proses lebih Lanjut Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet	37.(2018)	1/23/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	23.(2018)	Deputi Bidang Administrasi	OUTCOME IKK 2
199	Penyampaian Draft Final Perseskan tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet	25.(2018)	1/15/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	20.(2018)	Waseskab	OUTCOME IKK 2
200	Rancangan Perseskab tentang Pedoman Persiapan Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet	5.(2018)	1/3/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
201	Permohonan Tanda Tangan Memorandum Pendistribusian Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet	68.(2018)	2/14/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	43.(2018)	Eselon 1 Setkab Setneg	OUTCOME IKK 2
202	Permohonan Tanda Tangan Surat Pengundangan Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pananggulangan Bencana Keadaan Tertentu	105.(2018)	3/19/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
203	Laporan Rapat Penyusunan RPerpres Perubahan atas Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional	137.(2018)	4/2/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
204	Permohonan Tanda Tangan Otentifikasi Salinan dan Surat Distribusi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	306.(2018)	8/15/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 2
205	Tindak Lanjut Permohonan Data BOP Wakatobi dan BOP Bromo-Tengger-Semeru	473.(2018)	12/19/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1
206	Permohonan kesediaan Presidenn Meresmikan Situs Observatorium Nasional Timau tanggal 5 Mei 2018	115.(2018)	3/21/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 3
207	Penyampaian Bahan Ratas Peningkatan Cadangan Devisa Indonesia	274.(2018)	7/30/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTCOME IKK 3
208	Penyampaian Daftar Rencana Kegiatan	153.(2018)	4/12/2018	Asdep Bidang	1082	Seskab	OUTCOME IKK 3

No	PERIHAL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN
	Kementerian/Lembaga yang Memerlukan Kehadiran Presiden pada Bulan April s.d. Juni 2018			ESDM			
209	Permohonan Kesediaan Presiden Meresmikan Hasil Pengembangan Inovasi Teknologi 4.0 di Papua	210.(2018)	5/21/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1439/M-598	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 3
210	Permohonan Kehadiran Presiden untuk Meresmikan Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK)	313.(2018)	8/21/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2318/M-951	Seskab- Presiden	OUTCOME IKK 3
211	Usulan Pokok Bahasan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Bidang Kepanwisataan, Ristek dan Lingkungan maritim	381.(2018)	10/15/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTCOME IKK 1

### 3. Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

#### REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun  
Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET  
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
Setuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018

Berdasarkan Mutasi  
Halaman : 1 dari 5

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
1304	ASDEP BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM	1.050.000.000	1.050.000.000	344.082.251	690.481.294	1.034.563.545	98,52	15.436.455
06.5830	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM	1.050.000.000	1.050.000.000	344.082.251	690.481.294	1.034.563.545	98,52	15.436.455
001.006	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM	1.050.000.000	1.050.000.000	344.082.251	690.481.294	1.034.563.545	98,52	15.436.455
	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	838.716.000	976.208.000	333.482.251	628.522.785	962.005.036	98,54	14.202.964
516	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	686.292.000	795.926.000	239.186.213	549.603.565	788.789.778	99,10	7.136.222
516.AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	51.680.000	66.240.000	64.840.000	64.840.000	64.840.000	97,88	1.400.000
	BELANJA BAHAN	51.680.000	66.240.000	64.840.000	64.840.000	64.840.000	97,88	1.400.000
	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	10.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	BELANJA SEWA	10.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	BELANJA JASA PROFESI	14.277.000	0	0	0	0	0,00	0
	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	36.400.000	18.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	83,33	3.000.000
	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	36.400.000	18.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	83,33	3.000.000
	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	49.900.000	196.350.000	131.300.000	63.650.000	194.950.000	99,28	1.400.000
	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	49.900.000	196.350.000	131.300.000	63.650.000	194.950.000	99,28	1.400.000
	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	380.254.000	515.336.000	28.046.213	485.953.565	513.999.778	99,74	1.336.222
	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	380.254.000	515.336.000	28.046.213	485.953.565	513.999.778	99,74	1.336.222
	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	143.781.000	0	0	0	0	0,00	0
	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	143.781.000	0	0	0	0	0,00	0
516.AB	Pengumpulan Data	152.424.000	180.282.000	94.296.038	78.919.220	173.215.258	96,08	7.066.742
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	140.424.000	173.532.000	91.146.038	76.519.220	167.665.258	96,61	5.866.742
	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	140.424.000	173.532.000	91.146.038	76.519.220	167.665.258	96,61	5.866.742
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	12.000.000	6.750.000	3.150.000	2.400.000	5.550.000	82,22	1.200.000
	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	12.000.000	6.750.000	3.150.000	2.400.000	5.550.000	82,22	1.200.000
517	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan peraturan	157.724.000	51.892.000	5.550.000	45.158.509	50.708.509	97,71	1.183.491

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
perundang-undangan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim								
517.AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	157.774.000	51.892.000	5.550.000	45.158.509	50.708.509	97,71	1.183.491
521211-RM	BELANJA BAHAN	31.050.000	2.070.000	1.950.000	0	1.950.000	94,20	120.000
-001		31.050.000	2.070.000	1.950.000	0	1.950.000	94,20	120.000
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	29.600.000	7.900.000	3.600.000	3.970.000	7.520.000	95,18	380.000
-001		29.600.000	7.900.000	3.600.000	3.970.000	7.520.000	95,18	380.000
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	97.074.000	41.922.000	0	41.238.509	41.238.509	98,36	683.491
-001		97.074.000	41.922.000	0	41.238.509	41.238.509	98,36	683.491
518	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan L	53.560.000	21.900.000	5.050.000	16.800.000	21.850.000	99,77	50.000
518.AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	53.560.000	21.900.000	5.050.000	16.800.000	21.850.000	99,77	50.000
521211-RM	BELANJA BAHAN	16.560.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		16.560.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	37.000.000	21.900.000	5.050.000	16.800.000	21.850.000	99,77	50.000
-001		37.000.000	21.900.000	5.050.000	16.800.000	21.850.000	99,77	50.000



<b>Program</b>	: Dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan					
<b>Kegiatan</b>	: Dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim					
<b>Sasaran Kegiatan</b>	: Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim					
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kinerja</b>			<b>Alokasi Anggaran</b>		
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Realisasi</b>
	100 %	100 %	100 %			
	100 %	100 %	100 %	Rp 1.050.000.000	Rp 1.034.563.545	98,52%
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Perhubungan						
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan POU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman						
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman						

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

No	Pernyataan	Checklist	Halaman	
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	v	-
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	v	-
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	v	28
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	v	57-78
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	v	13
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v	50-52
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	v	-
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v	57-78
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v	-
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v	30, 41, 46
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	v	19
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	v	21
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	v	19
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	v	20
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	v	28

Kepala Bidang Fasilitas Operasional  
Kedeputian Bidang Kemaritiman

  
 Sarmini

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
SESUAI MEMORANDUM DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
NOMOR: M.513/ADM/11/2019 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT KABINET, ESELON I DAN ESELON II TAHUN 2019**

No	Pernyataan		Checklist	Halaman
1	BAB I	1. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	v	13
		2. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	v	30, 41, 46
2	BAB III	1. Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2018	v	28
		2. Analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi) . Contoh LKj Sekretariat Kabinet a. Template grafik perbandingan realisasi anggaran b. Tabel capaian kinerja dan anggaran	v	50 - 54
3	Lampiran	Checklist FO sesuai edaran Depmin	v	

Kepala Bidang Fasilitas Operasional  
Kedeputan Bidang Kemaritiman

  
 Sarmini